

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Pembagian tugas antara pemilik dengan manajemen pada suatu perusahaan, merupakan suatu model teori keagenan yang berkembang di tahun 1970-an. Teori tersebut menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara anggota-anggota dalam perusahaan. Teori agensi yaitu hubungan antara *principal* yang disebut sebagai pemilik entitas serta agen yang disebut sebagai manajemen di dalam perusahaan (Haryono, 2017).

Manajer sebagai manajemen diberikan otoritas oleh pemilik berupa pengambilan keputusan guna mendukung hubungan kontraktual yang baik. Pada *agency theory*, adanya perencanaan kontrak yang tepat dan benar dapat mengurangi konflik kepentingan antara pemilik dengan manajer. Faktanya, adanya konflik merupakan suatu yang tak terelakkan. Selain itu, terdapat pihak lain yang memiliki hak mengendalikan manajer secara residual (*residual control right*) atau sama dengan pemberian hak mengenai pengambilan keputusan dalam kondisi tertentu sebelum tertulis di dalam kontrak, yaitu seorang investor (Ningsaptiti, 2010; 9).

Terjadinya konflik antara *principal* dengan agen disebabkan adanya indikasi dimana keinginan dari pihak *principal* tidak sesuai dengan yang dijalankan oleh pihak agen yang disebut biaya keagenan (*agency cost*). Menurut Jensen and Meckling (1976) terdapat tiga hal yang meliputi biaya keagenan (*agency cost*) yaitu *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual cost*. Penjelasan secara singkat mengenai ketiga hal tersebut yaitu, prinsipal mengeluarkan biaya untuk membayar pengeluaran yang digunakan untuk mengamati, mengukur, serta mengontrol perilaku agen agar tidak menyimpang yang disebut *monitoring cost*.

Seorang agen memiliki tugas untuk membelanjakan sumber daya perusahaan (*bonding cost*) dengan benar dan tidak akan melakukan tindakan yang justru akan merugikan dirinya sendiri dan prinsipal. Selain itu, masih

terdapat kendala yang muncul dalam proses meningkatkan kesejahteraan bagi prinsipalnya, yang menimbulkan *residual cost* dimana nilai uang ekuivalen dengan pengurangan kesejahteraan yang dialami prinsipal (Jao dan Pagalung (2011; 45).

Pada hakekatnya, seorang principal bertugas memonitor aktivitas agen guna memastikan bahwa agen bekerja sesuai dengan keinginan para pemegang saham. Hal tersebut disebabkan, principal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kondisi perusahaan, dibandingkan seorang agen (Dewi, 2015). Berdasarkan penjabaran diatas, muncul istilah yang disebut asimetri informasi, dimana adanya kesenjangan dalam hubungan agen dengan principal dan penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Asimetri informasi dan masalah keagenan menjadi latar belakang adanya praktek manajemen laba. Asimetri informasi memunculkan peluang untuk melakukan manajemen laba (Morgeson,2015).

2.1.2 Ukuran Perusahaan

Salah satu ukuran kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba yang maksimal dapat dilihat dari rasio-rasio yang menunjukkan perkembangan atau kemunduran dari operasional normal perusahaan tersebut, hal ini dapat dilihat salah satunya dari rasio pertumbuhan, dimana rasio pertumbuhan menunjukkan ukuran kenaikan atau penurunan kinerja keuangan suatu perusahaan yang dapat dilihat dari perbandingan tahun sebelum dan sesudah maupun sedang berjalan untuk beberapa pos akuntansi keuangan perusahaan. Dalam rasio pertumbuhan ini akan dihitung seberapa jauh pertumbuhan dari beberapa pos penting dalam laporan keuangan. Ikatan Akuntansi Indonesia (SAK, 2007:10) mendefinisikan aktiva sebagai sumber daya yang dikuasai perusahaan dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

Ukuran perusahaan atau skala perusahaan adalah ukuran perusahaan yang ditentukan dari jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan dapat ditentukan oleh laba yang diperoleh perusahaan. Besar ukuran perusahaan juga dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar

maka semakin besar pula ukuran yang dimiliki oleh perusahaan tersebut (Hasnawati, 2015).

Skala pengukuran yang digunakan yaitu dengan skala rasio. Ukuran perusahaan (*firm size*) dapat diukur dengan menggunakan total aktiva, penjualan, atau modal dari perusahaan tersebut. Ukuran aktiva dari perusahaan tersebut menjadi salah satu tolak ukur perusahaan. Perusahaan dengan total aktiva besar maka akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap pucaknya dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek dalam jangka waktu yang relatif lama. Hal lain yang ditunjukkan melalui total aktiva perusahaan yang besar yaitu menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi yang relatif stabil dan lebih mampu untuk menghasilkan laba yang besar. (Rindawati :2016)

2.1.3 *Leverage*

Gambaran tentang perkembangan finansial suatu perusahaan dapat diperoleh dengan perlu adanya pengadaaan analisa atau interpretasi terhadap data finansial dari perusahaan bersangkutan, dimana data finansial itu tercermin dalam laporan keuangan. Ukuran yang sering digunakan untuk analisa finansial adalah rasio. Analisa laporan keuangan menyangkut pemeriksaan keterkaitan angka–angka dalam laporan keuangan dan trend angka–angka dalam beberapa periode, satu tujuan dari analisis laporan keuangan menggunakan kinerja perusahaan yang lalu untuk memperkirakan bagaimana akan terjadi dimasa yang akan datang. *Leverage* mengukur besarnya aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan semakin tingginya resiko pada kreditur berupa ketidak mampuan perusahaan dalam membayar semua kewajibannya (Ardyansah, 2014).

Meskipun analisis rasio mampu memberikan informasi yang bermanfaat sehubungan dengan keadaan operasi dan kondisi keuangan perusahaan, terdapat juga unsur keterbatasan informasi yang membutuhkan kehati–hatian dalam mempertimbangkan masalah yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Rasio keuangan dapat dibagi kedalam tiga bentuk umum yang sering dipergunakan salah satunya Rasio Solvabilitas (*leverage*).

Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukkan resiko yang dihadapi perusahaan. Semakin besar resiko yang dihadapi, maka ketidakpastian untuk menghasilkan laba dimasa depan juga akan makin meningkat (Agusti, 2014).

Adapun Rasio yang tergabung dalam *leverage ratio* adalah :

- a. *Total Debt to Equity Ratio* (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)
Merupakan Perbandingan antara hutang – hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan serta menunjukkan kemampuan pengelolaan modal sendiri oleh perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya .
- b. *Total Debt to Total Asset Ratio* (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)
Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka panjang serta jumlah seluruh aktiva diketahui. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjakan oleh hutang.
- c. Rasio Rentabilitas, rasio ini disebut juga sebagai *Profitability Ratio* yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan, profitabilitas suatu perusahaan
- d. Mewujudkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut.

2.1.4 Good Corporate Governance

2.1.4.1 Definisi Good Corporate Governance

Suatu perusahaan dapat dikatakan berkinerja baik apabila perusahaan tersebut menerapkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Faozan (2015; 1), menyatakan, adanya keterlibatan berbagai kelompok dalam suatu pemerintahan negara dengan berbagai kepentingan yang beragam dengan satu tujuan, yaitu mengurangi terjadinya masalah tindakan kolektif yang melibatkan berbagai investor disebut *corporate governance*.

Menurut pendapat dari *forum for corporate governance in Indonesia* (FCGI, 2004: 1) pengertian *Good Corporate Governance* yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus

(pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang para pemegang kepentingan interen dan eksteren lainnya yang berkaitan dengan hak serta kewajiban mereka, dengan kata lain adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan jalannya kegiatan operasional perusahaan.

Corporate Governance merupakan sistem terhadap pengawasan dan keseimbangan baik secara internal maupun eksternal pada perusahaan. Sistem tersebut menjamin bahwa perusahaan akan melaksanakan kewajibannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) dan bertindak dengan tanggung jawab sosial dalam segala bidang dari bisnis perusahaan yang bersangkutan (Jill et. al, 2005).

Berdasarkan pengertian yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah *Good Corporate Governance* adalah sebuah sistem terstruktur yang mengatur pengendalian serta pengaturan perusahaan mengenai mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam mengurus perusahaan dan juga nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri.

2.1.4.2 Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*

Penerapan praktik *good corporate governance* memiliki tujuan yang akan berdampak bagi perusahaan yang menerapkan praktik tersebut. Tujuan dari penerapan praktik *good corporate governance* menurut (Sutojo dan Aldrige, 2005; 4) di antaranya; melindungi hak dan kepentingan pihak eksternal seperti para pemegang saham, kreditur dan pemerintah atau para anggota *the stakeholders* non pemegang saham, meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham, meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja para dewan pengurus atau *Board of Directors* serta manajemen dalam perusahaan, meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Terciptanya suatu nilai tambah yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan atau kepada pemangku kepentingan merupakan tujuan lainnya dari *good corporate governance*. Pada teorinya, dijelaskan bahwa dengan kinerja keuangan yang meningkat, berkurangnya resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri,

maka *corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor (Emrinaldi, 2007)

Penjabaran mengenai tujuan dari penerapan praktik *good corporate governance* menjadi acuan bagi para pelaku usaha agar dapat tercipta suatu hasil yang baik melalui tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan bersama.

2.1.4.3 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Selain berkaitan dengan tujuan dari penerapan praktik *good corporate governance* maka timbul prinsip dasar yang mendasari penerapan praktik tersebut. Adapun prinsip-prinsip dasar yang dapat diperhatikan dalam *corporate governance*, yaitu sebagai berikut (Sutedi, 2011: 10-12); Pertama adalah transparansi (*Transparency*) berfungsi guna menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder.

Kedua, dapat dipertanggungjawabkan (*Accountability*) Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh sebab itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain.

Ketiga, Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*), berhubungan dengan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperlihatkan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Keempat, Berkepanjangan (*Sustainability*), perusahaan yang menghasilkan keuntungan, dalam jangka panjang harus menemukan cara untuk dapat memuaskan pegawai dan komunitasnya agar berhasil.

Sedangkan Prinsip kelima yang dijadikan sebagai dasar penerapan *good corporate governance*, yaitu; Pertanggungjawaban (*Responsibility*). Pertanggung jawaban adalah suatu keharusan bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

2.1.4.4 Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

Munculnya praktik penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* bertujuan guna menciptakan suasana lingkungan pekerjaan yang kondusif dalam arti menunjang perusahaan untuk mencapai tujuannya secara bersama-sama dengan metode maupun perencanaan yang terstruktur dan dijalankan dengan baik dan benar. Menurut Daniri (2005;14) jika perusahaan menerapkan mekanisme penerapan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan efektif, maka akan dapat memberikan manfaat antara lain; mengurangi *agency cost*, biaya pertanggungjawaban yang diserahkan kepada manajemen, mengurangi biaya modal (*Cost of Capital*), meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik secara berkelanjutan serta menciptakan dukungan para *stakeholder* dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan.

Manfaat penerapan dari *corporate governance* juga dirumuskan oleh FGCI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*). Menurut FGCI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*), dengan keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan *good corporate governance* akan memberikan manfaat antara lain; peningkatan terhadap kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik sehingga pencapaian efisiensi operasional perusahaan tercapai dan meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*. Kemudian, mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*). Selanjutnya, melakukan upaya mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Maka dari itu, pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena akan meningkatkan *shareholders value* serta deviden.

2.1.4.5 Mekanisme Internal

2.1.4.5.1 Dewan Komisaris Independen

Dalam struktur Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan. Berdasarkan Pasal 108 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris bertugas untuk “melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya

pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi”. Selanjutnya dalam Pasal 114 ayat 2 disebutkan bahwa “Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Pengertian komisaris independen sebenarnya berasal dari pengertian komisaris dalam pasal 1 angka 5 UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan; “Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan”. (1995: 135-136)

Pertimbangan Independen dalam diri seorang komisaris independen yaitu cara pandang atau penyelesaian masalah dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan. Pada dasarnya semua komisaris bersifat independen, dalam pengertian mereka harus mampu melaksanakan tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan perusahaan, dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan.

2.1.4.5.2 Keberadaan Komite Audit

Sesuai Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran Bapepam Nomor: Kep. 29/PM/2004 mengemukakan bahwa, Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara

pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Berdasarkan surat edaran BEJ, SE- 008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen (Marihhot dan Setiawan, 2007: 7).

Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dapat meminta kalangan luar, dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan, menjadi anggota komite audit guna mencapai tujuan dari komite audit tersebut. Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, auditor eksternal, sehingga, komite audit hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Wardhani dan Joseph, 2010).

2.1.4.5.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Mekanisme monitoring menjadi efektif dalam setiap pengambilan keputusan yang diambil oleh manajer karena keberadaan kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional yaitu proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi pada akhir tahun yang diukur dalam persentase jumlah kepemilikan insitusional terhadap jumlah saham secara keseluruhan (Dewi, 2008: 47).

Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi

yang dilakukan. Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar guna mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat.

2.1.4.5.4 Kepemilikan Manajerial

Perusahaan perseroan adalah perusahaan yang kepemilikannya ditentukan oleh jumlah saham yang dimiliki dalam perusahaan tersebut. Saham-saham tersebut diperjualbelikan di pasar modal sehingga apabila perusahaan memerlukan peningkatan pendanaan, perusahaan dapat menjual sahamnya kepada publik baik perseorangan atau pada institusi lain. Menurut Sutojo dan Aldrige (2005) saham yang dimiliki dalam suatu perusahaan oleh manajer, atau dengan kata lain manajer tersebut juga sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan disebut sebagai kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial tersebut juga bisa dikaitkan dengan teori keagenan, yaitu hubungan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham lainnya yang digambarkan sebagai *agent* dan *principal*.

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu aspek *corporate governance* yang dapat mengurangi *agency cost* apabila porsinya dalam struktur kepemilikan di perusahaan ditingkatkan. Pemberian kesempatan manajer terlibat dalam kepemilikan saham bertujuan untuk menyetarakan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Keterlibatan manajer tersebut mendorong manajer untuk bertindak secara hati-hati karena mereka akan turut menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambilnya. Selain itu, manajer akan termotivasi meningkatkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan agar semakin baik dan menarik bagi investor. (Dewi, 2008: 48).

Oleh karena itu, dibentuklah kepemilikan manajerial (*managerial own/insider ownership*). Kepemilikan manajerial juga digunakan sebagai presentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial, maka

manajemen akan cenderung lebih giat untuk bekerja sesuai dengan keinginan prinsipal.

2.1.5 Earning Management

2.1.5.1 Definisi Earning Management

Salah satu indeks yang menjadi cerminan keberhasilan suatu perusahaan dilihat melalui ukuran kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis adalah laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Informasi laba dalam *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) Nomor 2 menyatakan bahwa laba merupakan unsur utama dalam laporan keuangan dan sangat penting bagi pihak-pihak yang menggunakannya, karena memiliki nilai prediktif. Hal tersebut membuat pihak manajemen berusaha untuk melakukan manajemen laba dengan mengubah laporan keuangan agar hasil dari kinerja perusahaan tampak lebih baik oleh pihak dari luar perusahaan. (Healy dan Wahlen: 1999)

Berdasarkan beberapa pengertian yang dijabarkan sebelumnya bahwa manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajer maupun *top management* yang bertanggung jawab terhadap hasil pelaporan keuangan dengan melakukan pengelolaan terhadap manajemen laba dengan maksud mencapai suatu target tertentu demi keberlangsungan perusahaan dan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta pemegang saham (*shareholder*). Manajer melakukan manajemen laba dikarenakan beberapa motivasi yang mendorong tindakan tersebut.

2.1.5.2 Motivasi Earning Management

Banyak faktor yang bisa memotivasi untuk dilakukannya manajemen laba, salah satunya ingin menampilkan kinerja perusahaan melalui jumlah laba yang besar. Selain dari faktor-faktor yang ditimbulkan dari adanya praktek manajemen laba, juga terdapat motivasi yang mendasari dilakukannya manajemen laba.

Sulistyanto (2008: 64-90) menjabarkan mengenai motivasi mengapa seorang manajer melakukan upaya manajemen laba yaitu;

1. Motivasi Pasar Modal

Perkembangan pasar modal merupakan dampak dari perubahan orientasi dunia usaha. Apabila beberapa dekade yang lalu dunia usaha cenderung memilih menggunakan dana pinjaman atau hutang untuk mengembangkan bisnisnya (*debt oriented*). Dunia saat ini telah mengalami perubahan orientasi dalam mencari dana. Tidak lagi tergantung pada lembaga keuangan maupun perbankan, tetapi lebih memilih menggunakan dana yang diperoleh dari pasar modal (*stock market oriented*). Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa alasan di antaranya;

- a. Bunga hutang yang harus dibayarkan kepada kreditur relatif lebih tinggi dibandingkan deviden yang dibayarkan kepada investor, sehingga menjadi beban periodik yang harus ditanggung oleh perusahaan. Hal ini membuat perusahaan memiliki kinerja perusahaan dengan periode lebih rendah.
- b. Biaya bunga yang merupakan pengeluaran secara periodik yang wajib dibayar meski perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. Pembayaran deviden tergantung pada kebijakan perusahaan, yaitu dengan tidak tergantung pada laba yang diperoleh perusahaan.
- c. Hutang merupakan kewajiban yang harus dilunasi perusahaan pada waktu yang ditentukan. Dana pasar modal merupakan sebagian modal perusahaan yang tidak harus dikembalikan pada pemiliknya.

2. Penawaran Saham Perdana

Penawaran saham, perdana atau biasa disebut *initial public offerings* (IPO) merupakan penawaran saham suatu perusahaan *private* untuk pertama kalinya kepada publik. Sebagai perusahaan *private* maka seluruh kepentingan perusahaan itu dimiliki dan dikuasai oleh orang, keluarga atau kelompok tertentu, sehingga perusahaan semacam ini sering kali disebut sebagai perusahaan keluarga atau perusahaan tertutup.

Ketika perusahaan dinyatakan telah *go public*, informasi keuangan merupakan sumber informasi penting. Informasi ini

dapat digunakan sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai perusahaan. Untuk mempengaruhi keputusan calon investor, maka manajer berusaha menaikkan laba yang dilaporkan. Selain itu, motivasi pasar modal juga mempengaruhi dalam tindakan manajemen laba. Penggunaan informasi secara luas oleh investor dan analisis keuangan untuk melindungi nilai sekutitasnya, dapat menciptakan dorongan manajer untuk melakukan manajemen laba.

3. Motivasi Kontraktual (bonus atau kompensasi manajerial dan utang)

Manajer selalu berusaha untuk menampilkan hasil kinerja perusahaan yang terbaik khususnya bagi para pemegang saham maupun pihak yang berkepentingan. Selain menampilkan hasil kinerja perusahaan, hal yang paling terpenting adalah manajer berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dan menyejahterakan pihak-pihak yang berkepentingan. Upaya yang dilakukan manajer tersebut akhirnya memunculkan keinginan untuk mencari keuntungan pribadi dalam hal penguasaan informasi mengenai perusahaan yang nantinya bisa dimanipulasi.

Akibatnya, pihak-pihak yang berkepentingan tersebut menjadi tidak bisa menerima hasil yang optimal dari hubungan bisnisnya dengan perusahaan. Hal ini juga bisa menyebabkan pihak pemilik dan kreditur kehilangan dana apabila upaya ini dilakukan secara terus menerus dalam jangka panjang. Oleh karena itu, motivasi kontrak ini muncul karena perjanjian antara manajer dengan pihak lain yang berbasis pada kompensasi manajerial (*managerial compensation*) dan perjanjian utang (*debt covenant*).

- a. Motivasi bonus merupakan dorongan bagi manajer dalam melaporkan laba yang diperolehnya untuk memperoleh bonus yang dihitung atas dasar laba. Jika laba lebih rendah daripada target yang ditetapkan maka akan mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi dengan mentransfer laba masa depan menjadi laba sekarang dengan harapan akan memperoleh bonus. Bahkan agar dapat memperoleh bonus

lebih besar manajer melakukan pendekatan *chief executive officers* (CEO) yaitu dengan mengundurkan diri, yang digunakan sebagai upaya untuk memaksimalkan laba sebagai upaya untuk menaikkan bonus.

- b. Pelanggaran Perjanjian Hutang (*debt covenant violation*) membuktikan adanya penggunaan akrual dengan menaikkan laba dalam laporan keuangan tahunan perusahaan yang melanggar. Kontrak hutang jangka panjang (*debt covenant*) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman (lender atau kreditur) dari tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti deviden yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja dan kekayaan pemilik berada dibawah tingkat yang telah ditentukan yang mana semuanya menurunkan keamanan atau menaikkan risiko bagi kreditur yang telah ada. Motivasi ini sejalan dengan hipotesis *debt covenant* dalam teori akuntansi positif yaitu semakin dekat suatu perusahaan dengan pelanggaran perjanjian hutang maka manajer akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak.

4. Motivasi *Antitrust* atau Regulasi Pemerintah yang Lain

Bagi para penetap standar (*standar setter*), perhatian terhadap manajemen laba menjadi penting karena manajemen laba apapun alasannya dapat mengarah kepada penyajian pelaporan keuangan yang tidak benar dan akhirnya dapat mempengaruhi alokasi sumber daya yang ada. Manajer dapat memanipulasi laba dengan berbagai cara, baik yang secara langsung berpengaruh terhadap keputusan operasi, pembiayaan, investasi maupun dalam bentuk pemilihan prosedur akuntansi yang diperbolehkan dalam prinsip akuntansi berterima umum.

2.1.5.3 Bentuk-bentuk *Earning Management*

Bentuk-bentuk pengaturan laba yang dikemukakan oleh (Scott, 2003:383) yaitu ;

1. *Taking a Bath*

Digunakan selama periode reorganisasi, ketika ada pergantian direksi. Jika teknik ini digunakan maka biaya-biaya yang ada pada periode yang akan datang diakui pada periode berjalan. Hal ini dilakukan jika kondisi yang tidak menguntungkan tidak bisa dihindari. Akibatnya, laba pada periode yang akan datang menjadi tinggi meskipun kondisi yang tidak menguntungkan.

2. *Income Minimization*

Merupakan suatu bentuk manajemen laba, dengan cara meminimalisasi atau meminimumkan laba yang disebabkan karena motif politik atau motif meminimumkan pajak. Cara ini dilakukan pada saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan (*write off*) atas barang-barang modal dan aktiva tak berwujud, pembebanan pengeluaran untuk iklan, riset, dan pengembangan yang cepat.

3. *Income maximization*

Merupakan suatu bentuk manajemen laba dengan cara memaksimalkan laba yang bertujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar. Dalam bentuk manajemen laba ini dilakukan pada saat perusahaan yang melakukan suatu pelanggaran perjanjian hutang.

4. *Income Smoothing*

Bentuk manajemen laba dari *income smoothing* adalah suatu perusahaan umumnya lebih memilih untuk melaporkan pertumbuhan laba yang stabil daripada menunjukkan laba yang mengalami peningkatan maupun penurunan secara drastis. Metode ini dilakukan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar.

5. *Timing Revenue and Expenses Recognition.*

Metode pengakuan beban dan penjualan ini dijabarkan melalui proses penjualan pada periode dimasa datang diakui sebagai penjualan pada periode berjalan dan menggeser biaya penjualan periode berjalan ke periode mendatang untuk menghasilkan laba tahun berjalan yang lebih tinggi atau sebaliknya jika ingin menurunkan laba.

2.1.5.4 Teknik *Earning Management*

Penerapan praktik manajemen laba menggunakan beberapa teknik tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun teknik dan pola manajemen laba menurut Asyik (2003: 23) dalam dilakukan dengan tiga teknik yaitu:

1. Mengubah metode akuntansi

Perubahan metode akuntansi dilakukan oleh manajemen dengan cara mengubah metode akuntansi berbeda dari yang sebelumnya digunakan. Hal tersebut dapat mengakibatkan peningkatan atau penurunan angka pada laba yang dihasilkan. Metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara berbeda, misalnya;

- a) Mengubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode jumlah angka tahun (*sum of the year digit*) ke metode depresiasi garis lurus (*straight line*).
- b) Mengubah periode depresiasi

2. Memanfaatkan Kebijakan Perkiraan Akuntansi

Cara kedua yang dilakukan manajemen yaitu dengan cara menyalahgunakan *judgement* (kebijakan) perkiraan akuntansi. Hal tersebut memberikan peluang bagi manajemen untuk melibatkan subyektivitas dalam menyusun estimasi, misalnya;

- a. Kebijakan mengenai perkiraan jumlah piutang.
- b. Kebijakan mengenai perkiraan biaya garansi.
- c. Kebijakan mengenai perkiraan terhadap proses pengadilan yang belum diputuskan.

3. Menggeser Periode Biaya atau Pendapatan

Cara ketiga yaitu dilakukan oleh manajemen dengan cara menggeser periode biaya atau pendapatan (sering disebut manipulasi keputusan operasional), misalnya;

- a) Mempercepat/menunda pengeluaran yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan hingga periode akuntansi berikutnya.
- b) Mempercepat/menunda pengeluaran untuk keperluan promosi sampai periode berikutnya.
- c) Bekerjasama dengan vendor untuk mempercepat atau menunda pengiriman tagihan sampai periode akuntansi berikutnya.
- d) Menjual Investasi sekuritas dengan maksud untuk memanipulasi tingkat laba
- e) Mengatur pada saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak terpakai

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
Welvin I Guna dan Arleen Herawaty (2010)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> , Independensi Auditor, Kualitas Audit dan Faktor lainnya terhadap Manajemen Laba	Variabel Dependen: Manajemen Laba Variabel Independen: Leverage, Kualitas Audit, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Komisaris Independensi, Independensi Auditor	<i>Leverage</i> , kualitas audit berpengaruh negatif signifikan , profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. sedangkan kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independensi, independensi auditor dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
Roodposhti dan Chashmi (2011)	The Impact of <i>Corporate Governance Mechanism on Earnings Management</i>	Variabel Dependen: <i>Earnings Management</i> . Variabel Independen: Mekanisme Internal (Konsentrasi kepemilikan, komisaris independen, dan dominasi CEO) Mekanisme Eksternal (Kepemilikan Institusional) Variabel Kontrol : Ukuran perusahaan dan <i>Leverage</i> .	Ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap <i>earnings management</i> , dan dominasi CEO, Sedangkan konsentrasi kepemilikan, komisaris independen, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>earnings management</i> .
Shehu Usman Hassan dan Abubakar	<i>Corporate Governance, Earnings Management</i> ,	Variabel Dependen : <i>Earnings Management</i> . Variabel Independen: Komposisi dewan,	Komposisi dewan berpengaruh terhadap <i>earnings management</i> , Sedangkan kepemilikan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
Ahmed (2012)	and <i>Financial Performance</i> : A Case Of Nigerian Manufacturing Firms.	Kepemilikan saham institusional, ukuran perusahaan, Audit skor <i>Governance</i> , kompensasi eksekutif	institusional, kompensasi eksekutif, ukuran perusahaan dan audit skor <i>governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>earnings management</i>
Naufal Aditya (2012)	Pengaruh Kualitas Auditor, <i>Debt</i> <i>to Asset</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010- 2012	Variabel Dependen: Manajemen Laba Variabel Independen: Kualitas auditor, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan	<i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan kualitas auditor dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
Veliandina Chivan Naftalia dan Marsono (2013)	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Manajemen Laba dengan <i>Corporate</i> <i>Governance</i> sebagai	Variabel Dependen: <i>Earnings Management</i> . Variabel Independen: <i>Leverage</i> . Variabel Moderasi: Kepemilikan institusional, kepemilikan	<i>Leverage</i> dan kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap <i>earnings management</i> , sedangkan kepemilikan manajerial, audit kualitas dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
	Variabel Pemoderasi.	manajerial, audit kualitas, dan komisaris independen.	<i>earnings management</i> .
I Dewa Gede Pingga Mahariana dan I Wayan Ramantha (2014)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia	Variabel Dependen: Manajemen Laba. Variabel Independen: Kepemilikan Manajerial dan kepemilikan institusional	kepemilikan manajerial terbukti berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan, hasil pengujian kepemilikan institusional tidak terbukti berpengaruh. Hasil pengujian ini membuktikan rendahnya nilai akrual dengan adanya kepemilikan manajerial yang tinggi.

Sumber : Data diolah

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Earning Management*

Ukuran perusahaan yaitu ukuran dari suatu perusahaan yang ditentukan dari jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Besar ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar ketiga hal tersebut, maka suatu ukuran perusahaan dikatakan akan semakin besar pula (Guna dan Herawaty, 2010; 59).

Kecenderungan melaporkan laba positif diduga kuat sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berukuran sedang dan besar. Alasan yang mendasari dugaan tersebut diantaranya; untuk mempertahankan kredibilitas perusahaan di dalam komunitas bisnis dan tanggung jawab sosial khususnya dalam penyajian informasi keuangan yang ditujukan bagi pihak eksternal yang tidak lain adalah para pemegang saham atau investor. Adanya kemampuan untuk menggunakan kecanggihan teknologi melalui system informasi yang memadai; diadakannya acuan oleh analis keuangan dalam melakukan analisa pasar; terdapat tekanan agar berkinerja sesuai dengan yang diharapkan oleh pasar dan para analis; serta memiliki posisi tawar kepada eksternal auditor yang meneliti dan memeriksanya (Kim et al :2003)

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₁: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *earnings management*.

2.3.2 Pengaruh *Leverage* terhadap *Earning Management*

Leverage adalah hutang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai asetnya, dalam rangka menjalankan aktivitas operasionalnya. Selain itu, leverage juga bisa dikaitkan dengan rasio, yaitu membandingkan total kewajiban dengan total ekuitas atau modal saham perusahaan. Nilai *leverage* yang meningkat berdampak pada resiko yang ikut meningkat pula, resiko tersebut yang kemudian akan dihadapi oleh investor, sehingga investor akan meminta imbal balik berupa keuntungan yang semakin tinggi pula (Guna dan Herawaty, 2010; 58).

Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya, sedangkan perusahaan yang mempunyai *leverage* lebih rendah lebih banyak membiayai

asetnya dengan modal sendiri. Semakin tinggi utang/ekuitas perusahaan, yaitu sama dengan semakin dekatnya (semakin ketat) perusahaan terhadap batasan-batasan yang terdapat pada perjanjian utang dan semakin besar kesempatan atas pelanggaran perjanjian dan terjadinya biaya kegagalan teknis, maka semakin besar kemungkinan para manajer menggunakan metode-metode akuntansi atau mengambil tindakan yang dapat meningkatkan laba. (Ma'ruf :2006)

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut:

H₂: *leverage* berpengaruh positif terhadap *earning management*.

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Earnings Management*

Seseorang dalam perusahaan yang memiliki wewenang untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses *monitoring* yang dilaksanakan secara efektif, merupakan tugas pemegang saham yang berupa sebuah institusi atau disebut kepemilikan institusional (Boediono, 2005). Keberadaan investor institusional juga dapat mendorong perhatian manajer terkait dengan kinerja perusahaan sehingga investor institusional mampu menjadi mekanisme pemantauan yang efektif terhadap setiap keputusan yang diambil oleh manajer khususnya mengenai informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan. (Midiastuty dan Machfoedz :2003)

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₃: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *earning management*.

2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Earning Management*.

Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan yang bersangkutan dengan afiliasinya. Manajemen memiliki insentif atau hubungan yang kuat untuk mengungkapkan informasi mengenai perusahaan dengan tujuan memenuhi tanggung jawab fidusiarinya serta untuk meningkatkan kinerja portofolio perusahaan. (Darmawati : 2003)

Adanya tuntutan manajemen untuk memenuhi segala bentuk tanggung jawab kepada pemilik (pemegang saham) menimbulkan tindakan manajemen untuk menampilkan hasil dari kinerja perusahaan melalui laporan keuangan yang baik. Pada level kepemilikan manajer yang tinggi, nilai perusahaan justru menurun ketika kepemilikan manajer meningkat. Hal ini disebabkan karena manajer dapat dengan bebas memaksimalkan utilitasnya tanpa takut adanya perlawanan dari dewan komisaris, maupun perlawanan dari investor besar. Keadaan tersebut nantinya akan berakibat menimbulkan masalah keagenan. (Susiana dan Herawaty : 2005)

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₄: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *earning management*.

2.3.5 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Earnings Management*

Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan terbukti efektif dalam mencegah praktik manajemen laba, karena fungsi utama keberadaan komisaris independen adalah untuk mengawasi jalannya kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan (Guna & Herawaty, 2010).

Komisaris independen merupakan salah satu mekanisme monitoring karena komisaris independen sangat efektif untuk meminimalisasi masalah keagenan (*agency problem*) yang timbul antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) karena keberadaan komisaris independen berasal dari luar perusahaan yang tidak memiliki hubungan bisnis dan hubungan keluarga dengan perusahaan (Makhdalena, 2012).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₅ : Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap praktek *earnings management*.

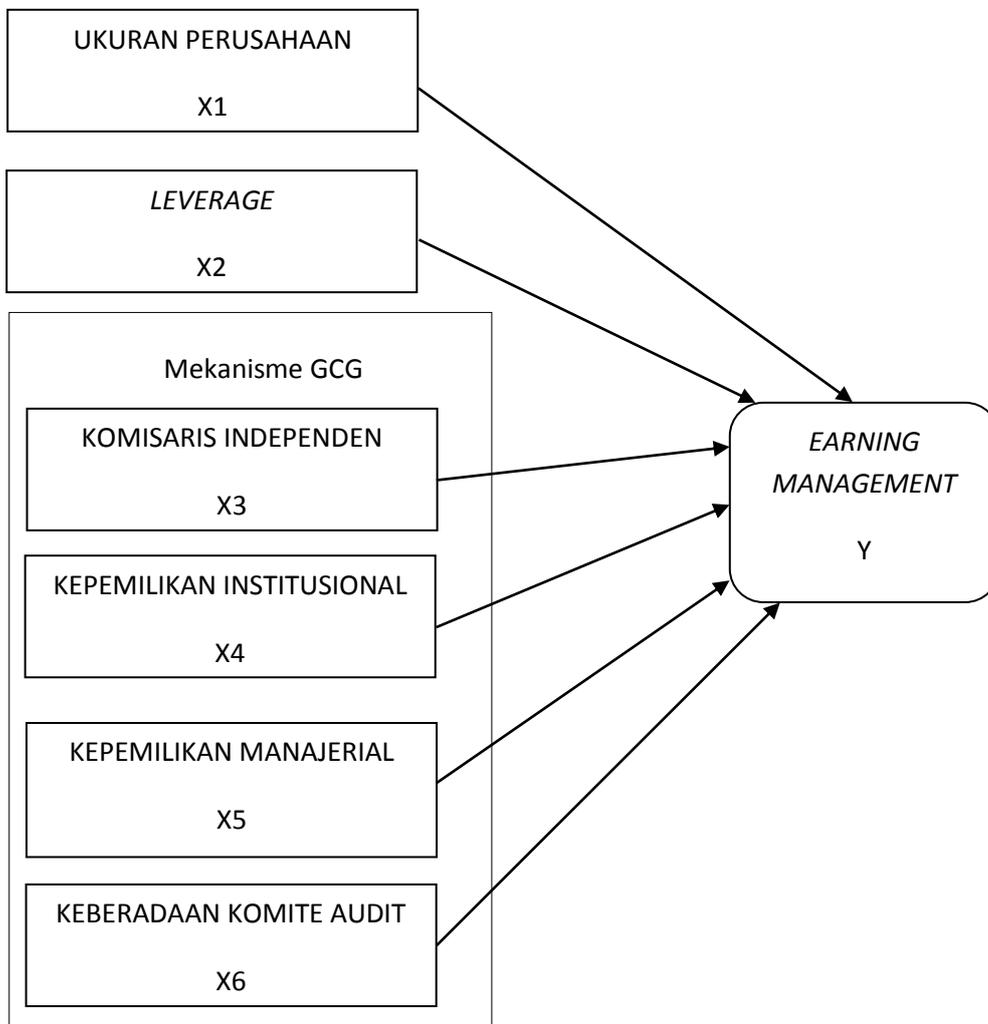
2.3.6 Pengaruh Keberadaan Komite Audit terhadap *Earning Management*.

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Komite audit yang dibentuk

memiliki fungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal, juga mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan (Dwi, 2014). Salah satu tujuan keberadaan komite audit yaitu, melakukan pengawasan dan menindaklanjuti kemungkinan penyimpangan material dalam bidang keuangan dan implikasi hukumnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₆: keberadaan komite audit berpengaruh negatif terhadap *earning management*.

2.4 Model Penelitian



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
(Model Penelitian)**